

BAB II LANDASAN TEORI

A. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang dikembangkan menjadi tujuan destinasi wisata karena memiliki potensi daya tarik tersendiri. Daya tarik tersebut biasanya berupa kombinasi antara atraksi wisata, akomodasi, serta berbagai fasilitas pendukung yang menyatu dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Menurut Kementerian Pariwisata, desa wisata merupakan suatu kesatuan yang menawarkan pengalaman yang autentik kehidupan masyarakat desa, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, maupun wisata hasil kreativitas masyarakat setempat.²⁵

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang mengembangkan aktivitas kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi daya tarik yang dimiliki. Pengembangan ini menjadi salah satu bentuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus memperkuat kehidupan sosial dan budaya di lingkungan desa. Konsep wisata yang dikembangkan di setiap desa wisata bisa sangat bervariasi. Misalnya, terdapat desa wisata yang mengusung konsep wisata *theme park* seperti *waterboom*, taman bunga, hingga berbagai instalasi yang menarik sebagai spot berfoto bagi para pengunjung.²⁶

²⁵ Nining Latianingsih, *Desa Wisata Digital: Inovasi, Pemberdayaan, Dan Masa Depan Berkelanjutan* (Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025), 19.

²⁶ Adrian Agoes and Indah Nur Agustiani, *Kajian Pengalaman Wisatawan Pada Kunjungan Wisata Perdesaan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), 13.

Desa wisata dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman wisata yang berbeda dengan suasana kota yang sibuk. Dengan mengusung konsep berbasis kearifan lokal, desa wisata mampu menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga edukatif, seperti mengenal budaya, sejarah, hingga pola kehidupan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama desa wisata yang membangun, dalam proses perencanaan, pengembangan, hingga pengelolaan desa wisata masyarakat lokal diberikan peran aktif dalam pengembangan desa wisata.²⁷

Di Indonesia, desa wisata dibagi menjadi empat jenis, yaitu desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri.

a. Desa Wisata Rintisan

Desa wisata rintisan adalah jenis desa wisata yang baru saja mulai beroperasi, dan masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas.

b. Desa Wisata Berkembang

Desa wisata ini ditunjukkan bagi desa wisata yang sudah stabil dan memiliki kepengurusan yang jelas.

c. Desa Wisata Maju

Desa wisata yang memiliki peran aktif dalam meningkatkan perekonomian warga desa dan sekitarnya.

²⁷ Suparman and Muzakir, *Ekonomi Pariwisata* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 47.

d. Desa Wisata Mandiri

Klasifikasi ini ditunjukkan bagi desa wisata yang sudah memiliki pengunjung dari berbagai lingkup yang lebih luas.²⁸

2. Karakteristik Desa Wisata

Desa wisata merupakan bentuk pengembangan wisata yang menawarkan daya tarik wisata alam, budaya, maupun buatan manusia, yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup. Desa wisata memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari desa pada umumnya, yaitu:

a. Memiliki Daya Tarik Wisata

Daya tarik desa wisata dapat berupa daya tarik alam (keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan kekayaan sumber daya alam), selain itu, juga ada daya tarik budaya (adat istiadat, kesenian, dan tradisi), dan daya tarik buatan manusia (situs sejarah, bangunan bersejarah, dan objek wisata buatan).

b. Dikembangkan Oleh Masyarakat Setempat

Pengembangan desa wisata melibatkan masyarakat setempat secara aktif, baik melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung, seperti berperan sebagai pengelola, penyedia jasa, serta pelaku ekonomi kreatif. Dengan keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya

²⁸ Kemenparekraf RI, "Mengenal Klasifikasi Desa Wisata di Indonesia dalam ADWI," Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2024, <https://kemenpar.go.id/berita/>.

menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan desa wisata harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat nyata dari berkembangnya aktivitas ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

d. Berorientasi pada Pelestarian Lingkungan

Pengembangan desa wisata harus berorientasi pada pelestarian kondisi lingkungan. Setiap kegiatan pengembangan perlu dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.²⁹

3. Manfaat Desa Wisata

Desa wisata kini menjadi salah satu jenis pariwisata yang semakin banyak diminati. Konsep ini tidak hanya menghadirkan destinasi wisata yang unik dan menarik bagi pengunjung, tetapi juga memberikan berbagai manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, lingkungan sekitar, serta perekonomian daerah. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata turut mendorong pemerintah pusat untuk kerja sama dalam menciptakan pengembangan kapasitas desa wisata secara menyeluruh.

²⁹ Suparman, *Pariwisata Budaya* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2024), 320.

Salah satu contoh nyatanya adalah semakin banyak desa wisata yang mampu mengelola aktivitas pariwisata secara mandiri serta didukung oleh lembaga lokal yang kuat seperti BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Masyarakat desa kini tidak hanya bergantung pada kunjungan wisatawan, tetapi juga mulai mengembangkan produk ekonomi kreatif yang dapat dijual baik secara *online* maupun *offline*, seperti kerajinan, produk makanan lokal, dan paket wisata.³⁰ Dengan adanya pengembangan desa wisata tersebut diharapkan mampu memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Ekonomi

1) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal

Desa Wisata memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan wisatawan, berbagai sektor usaha dapat berkembang, seperti akomodasi, kuliner khas, dan hasil pertanian yang dapat dijual ke wisatawan, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi warga desa.³¹

2) Diversifikasi Ekonomi Daerah

Desa wisata dapat membantu menciptakan diversifikasi ekonomi bagi daerah pedesaan yang biasanya hanya bergantung pada sektor pertanian.

³⁰ Dinis Cahyaningrum and Indra Taruna Anggapradja, *Pelatihan SDM Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2025), 77.

³¹ Yustisia Kristiana, Stephanie Theodora Mulyono, and Julita, *Desa Wisata: Konsep, Pengembangan, Dan Strategi Berkelanjutan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2024), 33.

3) Penciptaan Lapangan Kerja

Pembangunan desa wisata dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Tidak hanya di sektor pariwisata langsung seperti pemandu wisata atau pengelola akomodasi, tetapi juga sektor pendukung seperti penyedia jasa, pemasok makanan dan bahan baku.

b. Manfaat Sosial dan Budaya

1) Pelestarian Warisan Budaya

Dengan menarik wisatawan yang tertarik pada budaya lokal, masyarakat memiliki intensif untuk mempertahankan tradisi seperti tarian, musik, adat, dan kerajinan tangan.

2) Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Adanya pelatihan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wisata, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kepercayaan diri.

3) Penguatan Identitas Lokal

Kesadaran akan nilai dan keunikan budaya lokal meningkat ketika masyarakat melihat antusiasme wisatawan terhadap tradisi mereka. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih bangga dan menghargai warisan budaya mereka.

c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi dari sektor pariwisata.

Peningkatan ini pada akhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa dan meningkatkan layanan publik bagi masyarakat setempat.

2) Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Adanya desa wisata seringkali mendorong pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, peningkatan akses air bersih, serta Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga bagi masyarakat lokal yang merasakan dampak positif tersebut.³²

4. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata desa, baik dari segi daya tarik, fasilitas, maupun aksesibilitas, sehingga dapat menarik wisatawan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu:

a. Pemetaan Potensi Wisata

Tahap awal dalam pengembangan desa wisata diawali dengan pemetaan potensi yang dimiliki di suatu wilayah. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi daya tarik yang tersedia dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

b. Pengembangan Daya Tarik Wisata

³² Ibid.,35

Pengembangan daya tarik wisata ini dilakukan untuk mengembangkan daya tarik wisata agar lebih menarik bagi wisatawan. Pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti perbaikan infrastruktur, pemberian fasilitas, dan promosi.

c. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan.

d. Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata harus dikembangkan secara profesional agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan keberlanjutan wisata. Dalam pelaksanaannya, pengembangan desa wisata ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, atau pihak lainnya.³³

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih baik. Kesejahteraan ini dimulai dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pada aspek fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi maupun kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial memiliki arti yang luas, di dalamnya mencakup berbagai bentuk

³³ Suparman and Muzakir, *Pariwisata Budaya*. (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2024), 321.

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir untuk mendorong kesejahteraan sosial.³⁴

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mampu berkembang, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.³⁵ Kesejahteraan merupakan kondisi ideal di mana seseorang merasa hidupnya aman, berkecukupan, dan tenang. Kondisi ini tidak hanya melibatkan kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan non materi.³⁶

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan yang mencakup aspek material dan spiritual, yang ditandai dengan rasa aman, keselamatan, ketenteraman, serta kedamaian lahir dan batin. Dengan adanya kondisi ini, kebutuhan jasmani dan sosial dapat dipenuhi secara lebih optimal, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, kesejahteraan tersebut tetap didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap manusia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesejahteraan dalam pandangan luas menurut Adi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia agar dapat mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, kesejahteraan dalam pandangan umum diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan ketika

³⁴ Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Malang: UMM Press, 2022), 85.

³⁵ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2022), 40.

³⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 8.

berbagai kebutuhan hidup, terutama yang bersifat mendasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan telah terpenuhi dengan baik.³⁷

Kesejahteraan dapat diukur melalui pemerataan pendapatan, kemudahan akses terhadap pendidikan, serta peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan. Pemerataan pendapatan berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, peluang berusaha, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Adanya kesempatan untuk bekerja dan peluang berusaha menjadi syarat penting agar masyarakat mampu menggerakkan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya berkontribusi pada pendapatan yang diperoleh.

Konsep kesejahteraan dikembangkan secara lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan normal, kesejahteraan adalah standar *living, well, being, welfare* dan *quality of life*. Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan yaitu:

- a. Kualitas dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan pemenuhan dasar lainnya.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan, lingkungan sekitar dan keberadaan sarana penunjang.
- c. Kualitas hidup dari segi mental, seperti terdapatnya fasilitas pendidikan, kualitas lingkungan sosial budaya, dan ruang untuk pengembangan kapasitas diri.³⁸

³⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 34.

³⁸ Anjeli, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Batu Bata Di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2022).

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami tingkat kesejahteraan ekonomi suatu wilayah atau masyarakat. Indikator ini membantu dalam mengukur kemajuan ekonomi, mengidentifikasi tantangan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan indikator kesejahteraan masyarakat menjadi semakin penting karena dapat memungkinkan kita dalam melihat gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang kesejahteraan masyarakat.³⁹

Menurut Suharto dalam Syamsuddin kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai suatu proses atau upaya terencana yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Maka setiap individu atau masyarakat membutuhkan kondisi sejahtera, baik dalam hal material maupun dalam hal non material, sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.⁴⁰

Secara nasional kesejahteraan dapat dilihat melalui tahapan keluarga sejahtera yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut BKKBN, dalam

³⁹ Tony Susilo Wibowo, Tri Aripriabowo, and Sjahrani Permatasari Waluyo, *Pembangunan Ekonomi* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), 32.

⁴⁰ Syamsuddin, *Teori Kesejahteraan Sosial* (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), 4.

mengukur tahap kesejahteraan terdapat 5 indikator yang digunakan, yaitu:⁴¹

a. Keluarga Pra Sejahtera

Kondisi di mana suatu keluarga belum mampu memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar, meliputi agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi kebutuhan sosial dan psikologisnya masih belum terpenuhi secara optimal. Pada keluarga sejahtera I ini terdapat beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Seluruh anggota melaksanakan ibadah.
- 2) Dalam sehari seluruh anggota keluarga dapat makan dua kali atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 4) Rumah yang ditempati layak, beratap, berdinding, dan lantai bukan dari lantai tanah.
- 5) Seluruh anggota keluarga mendapatkan fasilitas kesehatan ketika sedang sakit.

c. Keluarga Sejahtera II

⁴¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Klasifikasi Keluarga Sejahtera* (BKKBN Pringsewu, 2023).

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga memenuhi kebutuhan psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan. Adapun kriteria Keluarga Sejahtera II yaitu sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota keluarga melaksanakan ibadah secara rutin.
- 2) Dalam seminggu minimal satu kali menyediakan daging/ikan/telur.
- 3) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni rumah.
- 4) Seluruh anggota berada dalam keadaan sehat dan bisa melakukan pekerjaan dalam tiga bulan terakhir.
- 5) Anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas yang memiliki pendapatan tetap.
- 6) Anak yang berusia 7-15 tahun bersekolah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi.

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat. Adapun kriterianya yaitu:

- 1) Seluruh anggota keluarga mempunyai kemauan untuk menambah pengetahuan mengenai keagamaan.
- 2) Pendapatan yang didapatkan sebagian ditabung.
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat.

- 4) Pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, psikologi, sosial dan pengembangannya serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi berkelanjutan bagi masyarakat, kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teratur sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.⁴²

3. Kesejahteraan dalam Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah *falah*, yang mencakup kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Konsep *falah* (kebahagiaan dan keberuntungan sejati) dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa keberhasilan sejati adalah tercapainya kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan material secara seimbang. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang sejati diukur dari keberkahan dan keseimbangan yang dihasilkan melalui amal yang diridhai Allah.⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Nor Aisah, "Mewujudkan Masyarakat Beradab Dan Sejahtera Dalam Agama Islam," *Masca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2025): 17–22.

Dalam bahasa arab kata *falah* berasal dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Adapun secara istilah *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Kesejahteraan juga mempunyai dasar yang kuat dalam Islam seperti yang tergambar dalam pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam seperti mengucapkan kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Konsep ini tidak hanya merujuk pada kesejahteraan lahiriah, tetapi juga mencakup ketentraman batin, kesenangan duniawi, dan ukhrawi, serta keseimbangan antara aspek material dan immaterial.⁴⁴

Kesejahteraan sosial dalam Islam dipahami sebagai suatu usaha untuk mencapai keseimbangan serta kemakmuran, baik bagi individu dan masyarakat secara luas. Dalam Islam, kesejahteraan sosial bukan hanya tujuan pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama umat Muslim untuk mencapainya. Melalui upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial diharapkan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu dapat hidup secara layak, memiliki martabat, serta turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera.⁴⁵

Al-Qur'an juga membahas tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 97 yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019, 1–19.

⁴⁵ Edo Alvizar Dayusman, Alimudin Alimudin, and Taufik Hidayat, "Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 127.

⁴⁶ "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah An-Nahl Ayat 97."

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Pada ayat diatas yang kehidupan yang baik dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang memperoleh rezeki yang halal dan baik. Di sisi lain terdapat pendapat bahwa kehidupan yang baik diwujudkan melalui ketaatan dalam beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-Nya serta memperoleh harta dengan cara yang halal. Pada hakikatnya, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terbebasnya suatu masyarakat dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tentram, baik secara lahir maupun batin.⁴⁷

Kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada upaya penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, serta memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada pencapaian kemakmuran individu, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

⁴⁷ Ristiyanti Ahmadul Marunta et al., “Konsep Kesejahteraan Perspektif Islam: Studi Para Pedagang Di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1558.

Islam menekankan kerjasama antar individu dan komunitas untuk mencapai kesejahteraan bersama, melalui prinsip ta'awun yang berarti saling membantu. Melalui instrumen seperti zakat, infak, wakaf, dan pembiayaan berbasis syariah, ekonomi Islam berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan inklusif. Penerapan prinsip ini dapat membawa dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan peluang kerja, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.⁴⁸ Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini memiliki dua makna utama, yakni *tauhid uluhiyyah* dan *tauhid rububiyah*. *Tauhid uluhiyyah* adalah keyakinan bahwa Allah itu satu, serta kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan milik-Nya. Dengan prinsip ini ditegaskan bahwa Allah berperan sebagai pencipta, pengatur, sekaligus pemilik seluruh alam semesta. Sedangkan, *tauhid rububiyah* adalah suatu keyakinan bahwa rizeki bagi seluruh makhluk telah ditentukan oleh Allah semata, serta setiap manusia yang menyakini-Nya akan diberikan arahan menuju pada keberhasilan.

b. Prinsip Khilafah

Prinsip yang menegaskan bahwa kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai wakil tuhan di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya sejak bijak, adil, dan tidak merusak. Manusia tidak memiliki harta secara mutlak, melainkan hanya sebagai

⁴⁸ Hadiat, *Ekonomi Mikro & Makro Syariah* (Pangandaran: Penerbit Intake Pustaka, 2025), 52.

pengelola yang harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana kekayaan dan pendapatan dialokasikan serta didistribusikan secara adil dan merata dalam masyarakat. Dalam Islam, kewajiban seperti zakat, shodaqoh, dan amal jariyah yang lain dijadikan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara kelas sosial yang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan lebih pada pemberian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

d. Masalahah

Secara umum masalahah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Dalam kajian ushul fiqh, para ulama mendefinisikannya masalahah sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, memberikan kegunaan, kebaikan, serta menghindarkan mudharat dan kerusakan. Al Ghazali menyimpulkan bahwa masalahah berkaitan dengan usaha untuk menjaga dan mewujudkan lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama (*hifdzu ad-ddin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan harta (*hifdzu al-mal*).⁴⁹

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya berfokus pada pembangunan materi, baik pada tingkat individu,

⁴⁹ Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

masyarakat, maupun negara. Berbagai aspek-aspek lainnya juga dianggap penting karena menjadi elemen penting karena menentukan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kesejahteraan yang hakiki berawal dari individu yang memiliki tauhid kuat, tercukupi kebutuhan dasarnya tanpa berlebih-lebihan, sehingga tercipta kondisi yang aman, tenteram, dan penuh kenyamanan.